

Pengantar Arsip Sidang Pertama BPUPK (29 Mei s.d. 1 Juni 1945)

Pemahaman yang baik tentang suatu peristiwa sejarah dapat diperoleh dengan melakukan rekonstruksi terhadap sumber-sumber sejarah yang ada. Berkenaan dengan kelahiran, perumusan, hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, upaya rekonstruksi dilakukan terhadap dokumen peninggalan BPUPK dan PPKI sebagai sumber primer yang saat ini disimpan dan dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta. Adapun dokumen yang digunakan mengacu pada **Arsip Muhammad Yamin Koleksi Khusus** dan **Arsip Abdoel Gaffar Pringgodigdo**.

Selain mengacu pada kedua sumber primer tersebut, upaya rekonstruksi peristiwa sejarah kelahiran, perumusan, hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara juga mengacu pada sumber-sumber lainnya berupa pemberitaan media massa mengenai sidang BPUPK maupun PPKI, baik dalam surat kabar dan majalah yang ada saat itu. Namun demikian perlu diketahui bahwa dalam masa pendudukan Jepang, penerbitan media dikendalikan dengan ketat oleh pemerintah Jepang dan karena itu tidak banyak surat kabar dan majalah yang diterbitkan. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa proses jalannya persidangan BPUPK dan PPKI hanya diliput secara terbatas dan tidak dapat diikuti oleh masyarakat Indonesia secara luas.

Proses kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila juga dapat ditelusuri dengan meneliti berbagai biografi dan memoar yang ditinggalkan oleh para tokoh yang terlibat dalam persidangan BPUPK dan PPKI, di antaranya adalah Sukarno dan Hatta. Di samping itu, proses sidang BPUPK juga disinggung dalam berbagai memoar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, seperti yang ditulis oleh Adam Malik, Sidik Kertapati, Ahmad Subardjo, dan Hatta. Berbagai biografi dan memoar tersebut memiliki unsur subjektivitas yang besar karena ditulis menggunakan perspektif pelaku dengan berlandaskan kepada memori individu atau ingatan. Untuk mendapatkan fakta-fakta yang kuat (*hard facts*), penggunaan biografi dan memoar sebagai sumber rekonstruksi sejarah memerlukan kritik sumber yang ketat.

Secara keseluruhan, jumlah dokumen yang ditinggalkan oleh BPUPK dan PPKI lebih dari 200 lembar. Dokumen-dokumen tersebut tersimpan dalam kondisi yang belum sistematis dan belum berurutan. Dokumen-dokumen yang berupa notula rapat yang ditinggalkan oleh BPUPK dan PPKI mengenai jalannya persidangan terpenggal-penggal karena terselip di bagian lainnya dan terdapat beberapa dokumen yang masih dalam pencarian. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya penanganan khusus ketika dokumen-dokumen tersebut tersimpan sebagai koleksi pribadi. Selain itu, lemahnya pengawasan dan pengaturan menyebabkan bagian-bagian dari dokumen tersebut tercecer atau dipinjam oleh pihak lain tanpa pernah dikembalikan.

ANRI dan BPIP kemudian melakukan rekonstruksi terhadap dokumen peninggalan BPUPK dan PPKI hingga menjadi sistematis dan berurutan sesuai dengan fakta kronologi sejarah. Adapun riwayat tentang perjalanan dokumen hingga tersimpan di ANRI akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

Dokumen BPUPK dan PPKI tersebut terdiri dari berbagai kategori seperti notula rapat, surat undangan rapat, dan daftar peserta. Semua kategori dokumen ini saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Rekonstruksi terhadap dokumen yang ada dapat menjelaskan cara kerja dan proses persidangan BPUPK dan PPKI berdasarkan fakta-fakta historis yang sebenarnya.

Bahan yang dapat diakses dalam proses seleksi dokumen BPUPK dan PPKI adalah bahan-bahan dalam bentuk digital, yaitu berupa hasil pemindaian (citra gambar) dari arsip fisik. Proses verifikasi bahan digital dilakukan dengan membandingkan hasil pemindaian tersebut dengan arsip fisik yang disimpan di ANRI. Dari proses verifikasi ini, diketahui terdapat beberapa dokumen

yang sedang dalam pencarian. Oleh sebab itu, penerbitan naskah sumber arsip Dasar Negara ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dengan harapan bagian-bagian yang masih dalam pencarian segera diselamatkan, diolah, dilestarikan, dilindungi, serta dimanfaatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada volume ini, arsip yang disajikan berasal dari masa sidang pertama BPUPK pada 29 Mei s.d. 1 Juni 1945. Arsip tersebut merupakan koleksi sumber primer yang telah dikurasi untuk kemudian diberikan catatan. Hal ini merupakan bagian dari proses heuristik yang diperlukan untuk menyajikan berbagai fakta historis yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini, yang menjadi sumber primer adalah dua Koleksi ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia): **“Muhammad Yamin Koleksi Khusus”** dan **“Abdoel Gaffar Pringgodigdo”** yang berupa alih media dari arsip fisik yang disimpan. Sementara itu, yang menjadi sumber pembanding adalah sebagai berikut:

- 1) de Graaff, M., & Tempelaars, A. (2022, June 21). K.6 Archivalia van R.M. mr. Abdul Gaffar Pringgodigdo, Secretaris van Staat van de Republiek Indonesië, 1944-1945 Nummer 5641-5656. *Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde archieven, (1922) 1944-1950 Nummer Toegang: 2.10.14*. Den Haag, Nederland: Nationaal Archief - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- 2) *Kan Pō* (Berita Pemerintah): Majalah diterbitkan oleh *Gunseikanbu, Ryukei Shyosha*;
- 3) *Lahirnya Pancasila*, 1947, Usaha Penerbitan Goentoer, Yogyakarta;
- 4) *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Koleksi dan Studi Konstitusi Muhammad Yamin tahun 1959 (dalam 3 jilid);
- 5) *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 2 – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Dokumen Sekretariat Negara Republik Indonesia (1992, 1995, 1998);
- 6) Kusuma, A.B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 7) Hatta, M. dkk. (“Panitia Lima”). (1984). *Uraian Pancasila: Dilengkapi Dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*. Jakarta: Penerbit Mutiara.